



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 18 November 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Susunan Kabinet 2019 - 2024
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./ Kasubag TU Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 34 (tiga puluh empat) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi C. Kepala Badan Kepegawaian Negara D. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dengan agenda Pembahasan Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Susunan Kabinet 2019 - 2024, hari Senin, 18 November 2019, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang dibahas pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Susunan Kabinet 2019 – 2024
2. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara dalam Susunan Kabinet 2019 – 2024
3. Rencana Strategis Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Susunan Kabinet 2019 – 2024

III. KESIMPULAN

Terhadap Rancangan Strategis Tahun 2019 – 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah disampaikan, secara prinsip Komisi II DPR RI dapat menerima dan memahami dengan beberapa catatan, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB untuk segera menyelesaikan masalah tenaga honorer kategori 2 dengan tuntas dan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Komisi II DPR RI mendukung Kementerian PANRB dan BKN memastikan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2019 dalam rangka mewujudkan SMART ASN menuju birokrasi berkelas dunia, dengan memperhatikan prioritas penerimaan CPNS 2019 bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga honorer kategori 2, dan tenaga fungsional teknis lainnya, dengan melalui mekanisme seleksi yang transparan, objektif, dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Komisi II DPR RI mendukung dan meminta Kementerian PANRB untuk segera menyelesaikan penataan birokrasi, konsolidasi, dan peningkatan fungsi kerja di instansi pemerintah pusat pada awal pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.
4. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB melakukan kajian mendalam terkait konsep dan strategi perampingan eselonering dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi dan efektivitas pelayanan pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama sosial dan politik.
5. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PANRB meningkatkan penyelenggaraan inovasi pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah aksesabilitas masyarakat mendapatkan pelayanan publik.
6. Komisi II DPR RI mendorong BKN meningkatkan kualitas tata kelola manajemen ASN dan sistem informasi ASN untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

7. Komisi II DPR RI mendorong KASN melakukan, beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pengawasan netralitas pegawai ASN terutama dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2020 yang akan datang.
 - b. Meningkatkan penerapan manajemen ASN berbasis sistem merit pada semua instansi pemerintah melalui penegakan nilai dasar ASN, kode etik, dan perilaku ASN dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, berintegritas, dan professional
 - c. Meningkatkan komunikasi publik dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas dari KASN.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.50 WIB.

Jakarta, 18 November 2019
KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270